

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS  
KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN DI KOTA BIMA*****EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT POLICIES AT THE CLEANING,  
LANDSCAPING AND CEMETERY SERVICE IN BIMA CITY*****Nike Ardiansyah<sup>1</sup>**Universitas Mbojo Bima<sup>1</sup>

Email:

[nikeardiansyah07@gmail.com](mailto:nikeardiansyah07@gmail.com)**Muhammad Taufiq<sup>2</sup>**Universitas Mbojo Bima<sup>2</sup>

Email:

[muhammadtaufiqawahab@gmail.com](mailto:muhammadtaufiqawahab@gmail.com)**Hendra<sup>3</sup>**Universitas Mbojo Bima<sup>3</sup>

Email:

[hen.dra13@yahoo.co.id](mailto:hen.dra13@yahoo.co.id)**Adilansyah<sup>4</sup>**Universitas Mbojo Bima<sup>4</sup>

Email:

[adilansyah@universitasmbojobima.ac.id](mailto:adilansyah@universitasmbojobima.ac.id)**Firliah Rizkiani<sup>5</sup>**Universitas Mbojo Bima<sup>5</sup>

Email:

[firliarizkiani89@gmail.com](mailto:firliarizkiani89@gmail.com)

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 4, No. 3, pp. 60--67

Juli 2024

Unit Publikasi Ilmiah  
Intelektual Madani  
Indonesia

**Abstrak:** Pengelolaan sampah menjadi tantangan utama dalam menjaga kebersihan lingkungan perkotaan dan kesehatan masyarakat. Kota Bima, sebagai contoh, menghadapi peningkatan signifikan dalam volume sampah akibat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bima, dengan fokus pada efektivitas dan kesesuaian dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima mencakup beberapa aspek penting seperti pembatasan timbunan sampah, pengumpulan dan pemilahan sampah, serta pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi yang meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat dalam memilah dan memanfaatkan kembali sampah. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya perbaikan dalam infrastruktur pengelolaan sampah serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah di Kota Bima.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Lingkungan.

**Abstract:** Waste management is the main challenge in maintaining the cleanliness of the urban environment and public health. Bima City, for example, is facing a significant increase in the volume of waste due to rapid population growth and economic activity. This study aims to evaluate the existing waste management policies at the Bima City Cleaning, Landscaping, and Cemetery Office, with a focus on effectiveness and suitability with environmental conditions and community needs. The research method used is qualitative descriptive, by collecting data through direct observation, interviews, and analysis of related documents. The results of the evaluation show that the waste management policy in Bima City covers several important aspects such as limiting waste piles, collecting and sorting waste, and transporting and final processing of waste. However, there are challenges in implementation which include limited facilities and infrastructure, as well as public awareness in sorting and reusing waste. The conclusion of this study emphasizes the need for improvements in waste management infrastructure and increased community participation to achieve sustainable development goals. Recommendations are given to strengthen regulations, increase public awareness, and encourage technological innovation in waste management in Bima City.

**Keywords:** Policy Evaluation, Waste Management, Environment.

**PENDAHULUAN**

Sampah bukan sekadar persoalan jelek, semrawut, kotor, dan jorok. Namun, permasalahannya lebih dari itu. Alasan paling mendasar tentang penanganan sampah secara serius dilatarbelakangi oleh efek atau akibat yang ditimbulkan akibat kelalaian manusia dalam penanganan sampah, yaitu: *pertama*, karena dapat mencemari sumber air bersih; *kedua*, dapat menyebabkan pencemaran udara (bau, asap, dan lain-lain); *ketiga*, dapat menimbulkan kebakaran; *keempat*, dapat menjadi sarang serangga dan tikus perantara

penyakit; *kelima*, dapat menyebabkan kecelakaan; *keenam*, dapat merusak bangunan; *ketujuh*, dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran, selokan, got, drainase, yang seringkali menyebabkan banjir atau tergenangnya air; *kedelapan*, dapat mengganggu keindahan, keelokan, dan keasrain lingkungan; dan sejumlah persoalan yang tidak mengenakan lainnya.

Banyak faktor yang menjadi pemicu, sehingga sampah dianggap atau menjadi masalah terutama di kota-kota besar yang penghuninya sangat padat, di antaranya:

*pertama*, tidak seimbangnya antara armada pengangkut dengan volume sampah yang dihasilkan; *kedua*, terbatasnya personil di bidang kebersihan; dan *ketiga*, belum banyak berubahnya pola pikir masyarakat yang masih menganggap selokan, got, drainase, kanal, lapangan umum, bahkan jalan raya sebagai “bak” sampah. *Keempat*, demikian halnya, sungai dan laut dianggap sebagai “keranjang” sampah raksasa.

Dengan demikian, persoalan sampah sangat kompleks, selain dari persoalan perubahan pola pikir, hingga volume sampah yang saban hari makin menumpuk/menggunung, baik yang bersumber dari pemukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, restoran, hotel, fasilitas umum, terminal, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, pelabuhan udara, dermaga, tempat hiburan/rekreasi, tempat pendidikan, hasil sapuan jalan, kawasan industri, dan saluran.

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Timbulan sampah tidak akan berkurang atau habis bahkan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi manusia serta semakin tinggi dan kompleksnya kegiatan manusia. Timbulan sampah yang semakin besar dari hari ke hari akan mengurangi ruang dan mengganggu aktivitas manusia sehingga tujuan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup justru membuat kualitas hidupnya menurun karena permasalahan timbulan sampah (Saputro, Y. E., Kismartini, K., & Syafrudin, S. 2016:84).

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat (Suyoto, 2008). Laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain kapasitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola

dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya.

Sampah didefinisikan sebagai semua bentuk limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan kemudian dibuang karena tidak bermanfaat atau keberadaannya tidak diinginkan lagi (Tchobanoglous, 1993).

Menurut Scheinberg (2010:9) pengelolaan sampah akan gagal saat sampah jumlahnya terlalu banyak, berada di tempat yang salah, tidak cukup dekat dengan tempat menjual sampah, atau tidak didaur ulang dengan cukup. Solusinya terletak pada mendesain ulang produk, kemasan, dan proses sehingga sesuai untuk input ke dalam rantai nilai. Inisiatif dan perangkat juga dapat digunakan untuk mendukung kesuksesan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat menjadi lebih efektif jika hanya didominasi oleh aktor pemerintah. Dalam hal kebijakan yang melibatkan masyarakat mempunyai keuntungan dimana masyarakat menikmati lingkungan yang bersih dan sekaligus bisa mendapatkan keuntungan sebagai mata pencaharian.

Pemerintah Sebagai penanggungjawab dapat mengurangi biaya pengelolaan sampah akibat keterlibatan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi penciptaan pekerjaan baru. Namun fakta menunjukkan pengelolaan sampah, hampir di setiap pemerintah daerah masih dominan dan partisipasi masyarakat kelihatan belum secara optimal dilakukan bahkan terkesan terabaikan.

Secara normatif terdapat sejumlah kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah, diantaranya UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup namun masih menjadi policy problem karena efektivitas implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya masalah substansial, struktural,

maupun kultural. Kemudian diterbitkan kebijakan yang baru yaitu UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan lagi tentang definisi sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Demikian UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baru sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan kedepan yang mempunyai peran penting. Dengan peraturan perundang-undangan yang baru disahkan ini pemerintah pusat dan daerah berkewajiban membuat kajian lingkungan hidup yang strategis. Kajian tersebut untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana yang dapat terimplementasikan.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat sebuah kota. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman di Kota Bima memiliki peran sentral dalam mengelola siklus hidup sampah, dari pengumpulan hingga pemrosesan akhir. Kebijakan yang efektif dalam pengelolaan sampah tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk kota.

Kota Bima, sebagai salah satu kota di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan aktivitas perkotaan yang intens, menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, volume

sampah yang dihasilkan juga meningkat secara substansial. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah dapat menjawab tantangan ini secara efektif.

Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya mencakup aspek teknis seperti infrastruktur pengumpulan dan pengolahan sampah, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Efektivitas kebijakan dapat diukur dari berbagai indikator, termasuk tingkat partisipasi masyarakat dalam program daur ulang, efisiensi biaya operasional, serta dampak terhadap kualitas udara, air, dan tanah.

Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan sampah di Kota Bima. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat menjadi lebih berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan, sehingga mendukung visi pembangunan Kota Bima menuju kota yang bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni.

Deskripsi penelitian terdahulu lebih banyak membahas penanganan sampah akan menjadi semakin baik bila ada kebijakan yang komprehensif dengan memperhitungkan kondisi di masa mendatang, sehingga menurut Said (2014) dapat terintegrasi dan komprehensif dengan memperhitungkan keberadaan lingkungan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat terbukti mampu mengurangi jumlah timbunan sampah dan bisa menghasilkan nilai sosial ekonomi bagi masyarakat. Secara teoritik sampah merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah merupakan sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, karena pengolahan, maupun karena sudah tidak memberikan manfaat dari segi sosial

ekonomi serta dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup (Hadwiyoto, 2002).

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan data yang bersifat deskriptif untuk mengungkapkan proses terjadinya dilapangan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong dalam Ardiansyah, Nike., Dkk, 2024:807). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelliti bermaksud mendeskripsikan dan menguraikan mengenai Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Evaluasi kebijakan pemerintah terhadap pengurangan dan penanganan sampah pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman di Kota Bima merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengurangi sampah yang meliputi pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, penerapan teknologi yang ramah lingkungan, serta menetapkan target pengurangan sampah.

Pertama, Pembatasan timbunan sampah bahwa Pembatasan timbunan sampah merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah karena dengan timbunan yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan beberapa hal yang dapat menyebabkan sumber

penyakit. Upaya penimbunan sampah belum dilakukan dengan maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga perlu ada terobosan lain yang dapat dilakukan dalam penimbunan sampah agar sampa-sampah yang ada tidak mencari lingkungan maupun dampak lain bagi kehidupan masyarakat Kota Bima;

Kedua, Pengumpulan sampah bahwa sampah yang ada di setiap rumah tangga maupun di setiap lingkungan perlu dikumpulkan untuk menjaga pencemaran limbah rumah tangga maupun pencemaran lingkungan sebagai dampak dari adanya sampah yang berserakan di sekitar lingkungan maupun di sekitar jalanan yang dibuang oleh masyarakat. Pengumpulan sampah sudah dilakukan dengan aturan baik dengan menggunakan alat angkut maupun sarana container yang ditempatkan pada beberapa alokasi strategis seperti di area pertokoan maupun pasar sehingga memudahkan masyarakat dalam membuang sampah;

Ketiga, Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah bahwa pemilahan sampah penting untuk dilakukan agar sampah dapat dikelompokkan sesuai dengan jenis sampah, jumlah maupun sifat sampah. Pemilahan sampah sudah dilakukan dengan baik berdasarkan jenis dan jumlah sampah meskipun kadang petugas mengalami kesulitan dalam melakukan pemilihan dan pemilahan sampah karena sampah dibuang berserakan;

Keempat, Pengangkutan sampah bahwa dalam mengimbangi pembuangan sampah di TPS tentunya harus diikuti dengan pengangkutan sampah. Karena apabila tidak dilakukan pengangkutan oleh petugas sampah dan tidak tigan dengan baik maka akan berdampak pada menumpuk dan tercecernya sampah di TPS. Pengangkutan sampah sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku baik yang berkaitan dengan jadwal angkut maupun pembagian tugas personil

yang mengangkut sampah pada setiap TPS yang tersebar di Kota Bima;

Kelima, Pengolahan sampah bahwa pengolahan sampah penting dilakukan untuk mengubah karakteristik dan komposisi serta jumlah sampah yang ada di Kota Bima agar sampah yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengolahan sampah belum dilakukan dengan maksimal karena terbatasnya peralatan yang dimiliki maupun tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kelestarian lingkungan;

Keenam, Pendaaur ulang sampah bahwa pendaaur ulang sampah dilakukan guna memanfaatkan sampah sesuai dengan jenis dan jumlah sampah. Pemanfaatan dan pendaaur ulang sampah yang ada di Kota Bima belum dilakukan dengan maksimal mengingat tidak adanya sarana pengolahan sampah dan terbatasnya animo dan kebutuhan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga seperti pembuatan pupuk kompos;

Ketujuh, Pemrosesan akhir sampah bahwa pemrosesan akhir sampah merupakan rangkaian atau proses terakhir dalam sistem pengelolaan persampahan pada suatu tempat yang telah dipersiapkan yang aman dan tidak mengganggu lingkungan. Pengolahan sampah seperti pembakaran atau lainnya diartikan juga sebagai pemrosesan akhir tetapi sebenarnya setiap pemrosesan masih menghasilkan suatu sisa pengolahan atau residu yang masih tetap harus dibuang. Sampah yang telah dikumpulkan perlu diproses dengan baik agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, pencemaran udara maupun pencemaran air. Karena apabila sampah yang membusuk dibiarkan begitu saja maka akan menyebabkan berbagai pencemaran maupun wabah penyakit. Pemrosesan akhir sampah belum dapat mengatasi masalah sampah dengan maksimal karena produksi sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga maupun industri kecil semakin hari semakin banyak dengan fasilitas dan

peralatan yang terbatas sehingga tidak mampu menjawab dan mengatasi semua permasalahan sampah yang ada di Kota Bima;

Kedelapan, Pemanfaatan kembali sampah bahwa pemanfaatan kembali sampah penting untuk dilakukan mengingat banyaknya produksi sampah rumah tangga maupun sampah industri kecil yang semakin lama semakin banyak sehingga perlu ada penanganan dan pemanfaatan sampah agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Pemanfaatan sampah di Kota Bima belum dilakukan karena tidak adanya peralatan dalam pengolahan sampah;

Kesembilan, Penerapan teknologi yang ramah lingkungan bahwa penerapan teknologi tepat guna merupakan suatu solusi yang dapat dilakukan dalam pengolahan dan pemanfaatan sampah yang ada di Kota Bima. Karena dengan pengelolaan melalui teknologi tepat guna maka sampah-sampah rumah tangga maupun sampah industri dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan maupun masalah lainnya dari dampak yang ditimbulkan oleh sampah. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sampah organik yang dapat diolah menjadi pupuk kompos; dan

Kesepuluh, Penetapan target pengurangan sampah secara bertahap bahwa penetapan target pengurangan sampah secara bertahap perlu dilakukan mengingat semakin banyaknya sampah-sampah yang ada dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga perlu diupakaj pengurangan sampah untuk mengurangi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh sampah yang tidak dapat diolah. Pemrosesan akhir sampah belum dapat mengatasi masalah sampah dengan maksimal karena produksi sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga maupun industri kecil semakin hari semakin banyak dengan fasilitas dan peralatan yang terbatas sehingga tidak mampu menjawab dan mengatasi semua permasalahan sampah yang ada di Kota Bima.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah terhadap pengurangan dan penanganan sampah di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bima, dapat disimpulkan; Pertama, Pembatasan Timbunan Sampah: Upaya pembatasan timbunan sampah perlu ditingkatkan karena timbunan yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat; Kedua, Pengumpulan Sampah: Pengumpulan sampah sudah dilakukan dengan baik dengan menggunakan alat angkutan dan sarana container yang tersebar strategis di area pertokoan dan pasar; Ketiga, Pemilahan Sampah: Meskipun sudah dilakukan pemilahan berdasarkan jenis dan jumlah, masih ada kendala dalam pemilihan dan pemilahan sampah karena seringkali sampah dibuang berserakan; Keempat, Pengangkutan Sampah: Pengangkutan sampah sudah sesuai aturan dengan jadwal yang teratur, namun perlu dipastikan agar tidak terjadi penumpukan atau tercecernya sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS); Kelima, Pengolahan Sampah: Pengolahan sampah belum optimal karena terbatasnya peralatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan; Keenam, Pendaaur Ulang Sampah: Pendaaur ulang sampah belum maksimal dilakukan karena kurangnya sarana pengolahan dan minimnya animo masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga; Ketujuh, Pemrosesan Akhir Sampah: Pemrosesan akhir sampah perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan dari sisa-sisa sampah yang dihasilkan; Kedelapan, Pemanfaatan Kembali Sampah: Pemanfaatan kembali sampah belum dilakukan secara signifikan karena keterbatasan peralatan dalam pengolahan sampah; Kesembilan, Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan: Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak

lingkungan dari sampah rumah tangga dan industri; dan Kesepuluh, Penetapan Target Pengurangan Sampah: Perlu penetapan target pengurangan sampah secara bertahap untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan, mengingat fasilitas dan peralatan yang masih terbatas.

## REFERENSI

- Ardiansyah, N., Adilansyah, A., Hendra, H., Junaidin, J., & Rizkiani, F. R. F. (2024). Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 803-810.
- Bryant C., and White L.G., 1982, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Djani, W., Wadu, J., & Lake, P. (2019). Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Kota Kupang. *Journal of Business Studies*, 4(2), 50-67.
- Dunn, William, N. 1981, *Public Policy, Analysis: An Intrduction*. Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall, Inc
- Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Saputro, Y. E., Kismartini, K., & Syafrudin, S. (2016). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 4(1).
- Side, Syarifuddin, 2001, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang* (Tesis), Pascasarjana UNHAS, Makassar.
- Suyoto, Bagong. 2008. *Rumah Tangga Peduli Lingkungan*. Prima Media, Jakarta.

Tchobanoglous, G., Teisen H., Eliasen, R,  
1993, Integrated Solid Waste  
Management, Mc.Graw Hill,  
Kogakusha, Ltd

UU Nomor 23 tahun 1997 tentang  
pengelolaan lingkungan hidup namun  
masih menjadi policy problem karena  
efektivitas implementasinya belum  
dapat mencapai tujuan yang  
diharapkan karena adanya masalah  
substansial, struktural, maupun  
kultural.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
tentang Pengelolaan Sampah.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan pengelolaan  
Lingkungan Hidup yang baru sebagai  
instrumen pelaksanaan kebijakan ke  
depan yang mempunyai peran penting.